BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. **Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan upaya dalam mendistribusikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat guna mewujudkan tujuan bersama menuju kesejahteraan alam studi kebijakan publik, digunakan pendekatan ekonomi serta pendekatan politik sebagai landasan analisis**.** Kebijakan publik ini juga diperlukan karena dalam masyarakat selalu terdapat kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan, seperti kaum miskin, pihak yang terpinggirkan dalam persaingan, kelompok gender, maupun kelompok minoritas. Maka dari adanya Kebijakan publik ini berperan dalam memperkuat upaya pencegahan terhadap praktik-praktik seperti korupsi, konflik kepentingan, kolusi, maupun pelanggaran lainnya, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara lebih efektif.

b. **Tahapan Perumusan Kebijakan Publik**

Perumusan Kebijakan publik ini melalui beberapa tahapan. Menurut Ripley (1985) dalam Yogopriyatno Jatmiko Dkk (2024) Menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

1) *Agenda setting*

Tahap ini berkaitan dengan proses di mana isu-isu tertentu dimasukkan ke dalam daftar perhatian publik dan pemerintah.

2) *Policy Formulation*

Dalam tahap ini, berbagai alternatif kebijakan disusun dan dianalisis. Para aktor seperti pejabat publik, ahli kebijakan, LSM, dan

akademisi dilibatkan untuk merumuskan strategi terbaik dalam menangani masalah.

3) *Policy Adoption*

Tahap ini adalah proses pengambilan keputusan resmi atas kebijakan yang telah dirumuskan.

4) *Policy Implementation*

Pada tahap ini, kebijakan yang telah disahkan mulai diimplementasikan oleh birokrasi atau lembaga pelaksana (seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi).

5) *Policy Evaluation*

Tahap ini mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

a. **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2005:101) dalam (Anirwan 2021) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atas tujuan yang diinginkan.

b. **Model Implementasi Kebijakan**

Beragam model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para pakar juga mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan, sebagaimana dirangkum oleh Agustino dalam jurnal Y. Gede, (2021) Sutmasa penjelasannya berikut ini:

1) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Dalam model Van Meter dan Van Horn, yang termasuk dalam

pendekatan *top-down*, implementasi dipandang sebagai suatu bentuk tindakan atau kinerja yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai hasil implementasi kebijakan publik yang optimal. Model ini berasumsi bahwa proses implementasi berlangsung secara linier, dimulai dari keputusan politik, dilanjutkan oleh pelaksana kebijakan, hingga menghasilkan kinerja kebijakan. Dalam model Van Meter dan Van Horn, terdapat sejumlah variabel yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik, yaitu:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan: Keberhasilan implementasi kebijakan hanya dapat dinilai secara tepat apabila ukuran dan tujuannya disusun secara realistis serta sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di tingkat pelaksana.
b) Sumber daya: Di antara berbagai jenis sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya manusia memegang peran paling krusial, di samping aspek lain seperti pendanaan dan alokasi waktu.
c) Karakteristik pelaksana kebijakan: Meliputi struktur organisasi baik yang bersifat formal maupun informal, yang harus selaras dengan objek perubahan yang ditargetkan. Misalnya, untuk mengubah perilaku masyarakat, diperlukan pelaksana dengan sifat yang tegas, jelas, dan konsisten.
d) Disposisi atau sikap pelaksana: Tanggapan pelaksana terhadap kebijakan bisa bersifat menerima atau menolak, khususnya bila kebijakan tersebut bukan hasil aspirasi masyarakat lokal yang memahami langsung kondisi di lapangan.

e) Komunikasi dan aktivitas antarorganisasi: Semakin baik komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam implementasi, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan akan semakin kecil.

f) Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik: Lingkungan eksternal yang tidak mendukung dapat menjadi penghambat keberhasilan implementasi, sedangkan situasi yang kondusif justru memperbesar peluang tercapainya tujuan kebijakan.

2) Model *Mazmanian* dan Paul Sabatier

Dalam model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Subarsono (2010:94) dalam Riski Maunde (2019), menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

a. Sifat atau karakteristik dari masalah yang dihadapi (*tractability of problems*),
b. Karakteristik dari kebijakan itu sendiri atau kemampuan regulasi dalam pelaksanaannya (*ability of statute to structure implementation*), serta
c. Faktor-faktor lingkungan yang berada di luar ketentuan hukum namun turut memengaruhi proses implementasi (*non-statutory variables affecting implementation*).

3) Model George *C. Edward* III

Model implementasi kebijakan menurut Menurut George C. Edward III dalam (syamsul ma'arif 2019) mengatakan bahwasanya studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah

salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Winarno:2012) Model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III yaitu Komunikasi yang efektif akan menjamin tersampaikannya pemahaman yang tepat mengenai suatu kebijakan, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara optimal dan efisien. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a) Transmisi: penyampaian informasi yang lancar akan berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan;
b) Kejelasan: informasi yang diterima oleh para pelaksana harus disampaikan secara jelas dan tidak membingungkan, karena ketidakjelasan dapat menghambat efektivitas implementasi;
c) Konsistensi: arahan atau instruksi dalam komunikasi harus disampaikan secara konsisten dan tidak berubah-ubah agar pelaksanaan kebijakan tetap terarah.

3) Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam (Nurmayana Siregar 2022) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

1. Dilihat dari Prosesnya. Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah Tujuan Kebijakan Tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a. Impact atau

dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang terkait dengan formulasi kebijakan. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mempengaruhi proses implementasi adalah:

1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interests affected)*. Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti akan berkaitan dengan banyak kepentingan.

2) Tipe manfaat (*type of benefits*). Suatu kebijakan harus ada beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat yang dirasakan itu dapat terbagi maupun tidak terbagi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*). Maksudnya seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan, harus ada skala yang jelas untuk pencapaiannya.

4) Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan berperan

penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) Pelaksana program (*program implementors*).

Harus sudah terdata dan terpapar pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk menjalankan suatu kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi (birokrasi) publik yang berperan dominan sebagai implementor, kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang dimilikinya.

6) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*).

Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya (*resource*) berkaitan dengan aset yang perlu dimiliki organisasi, baik aset dalam bentuk bahan dasar (*raw material*) yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun aset yang berupa orang, finansial, bakat manajerial, ketrampilan, dan kemampuan fungsional.

Lingkungan Implementasi (*context of implemention*), meliputi:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*).

Dalam suatu kebijakan perlu juga diperhitungkan kekuatan dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.

2) Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa (*institution*

and regim characteristics). Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karenanya perlu dikenali karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*). Maksudnya, sejauh mana kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang diimplementasikan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan konteks kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

3. Tinjauan Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi

Dalam Peraturan Wali Kota Makassar No. 29 Tahun 2018 diterbitkan sebagai dasar hukum pelaksanaan *Program Kanrerong Karebosi*, yaitu program revitalisasi kawasan Karebosi untuk menjadi pusat kuliner dan UMKM yang tertata, higienis, dan terorganisir. Perwali ini bertujuan untuk menata PKL yang sebelumnya berjualan secara sporadis di sekitar Lapangan Karebosi ke dalam kawasan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas publik. Dari adanya beberapa Peraturan yang terkait tentang PKL di Kota Makassar yang berdampak pada penertiban PKL, Satpol PP Kota Makassar melakukan pengawasan pada tempat-tempat yang dimaksud tersebut sebagaiamana tugas Satpol PP Kota Makassar dalam

penegakan setiap peraturan daerah Kota Makassar.

Dalam peraturan Wali Kota Makassar 29 tahun 2018 tentang PKL kanrerong karebosi Kota Makassar. Penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Kanrerong Karebosi bertujuan untuk menciptakan lingkungan berdagang yang lebih tertib, bersih, dan layak dikunjungi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui sistem pembinaan formal. Kanrerong Karebosi ditetapkan sebagai lokasi resmi bagi PKL kuliner, dengan sistem penempatan berbasis zonasi dan melalui proses verifikasi perizinan. Adapun kriteria pedagang yang diizinkan berjualan meliputi kepemilikan Tanda Daftar Usaha (TDU) Kota Makassar, telah terdaftar dan memiliki izin dari Dinas Koperasi dan UKM, serta tidak memiliki tempat usaha tetap seperti ruko.

Setiap PKL memiliki hak atas lapak yang layak dan mendapatkan akses pembinaan, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, tidak berjualan di luar area yang ditentukan, dan tidak menyewakan lapak kepada pihak lain. Pemerintah Kota juga menyediakan program pendampingan dan pembinaan berupa pelatihan manajemen keuangan, sanitasi pangan, pemasaran digital, hingga akses pembiayaan, yang dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN, perbankan, dan perguruan tinggi. Untuk mendukung pembiayaan usaha, disiapkan skema kredit lunak yang difasilitasi melalui kerja sama dengan Bank BNI dan lembaga perbankan lainnya.

Bagi PKL yang melanggar ketentuan, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, pencabutan izin, hingga pembongkaran lapak. Sementara itu, PKL ilegal atau yang tidak memiliki izin resmi akan ditertibkan oleh Satpol PP. Pengelolaan kawasan ini berada di bawah tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha

Lorong (UPTD-PLUL), yang mengatur fasilitas, keamanan, dan pengawasan secara rutin. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan juga sangat diharapkan untuk mendukung ketertiban dan turut serta mempromosikan kawasan Kanrerong sebagai sentra kuliner kota.

Menurut Zein Badudu (1996), penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penataan PKL tidak semata-mata berkaitan dengan relokasi atau pembatasan aktivitas berdagang, tetapi juga mencakup perencanaan yang matang, pendekatan yang humanis, serta pembinaan yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa penataan yang dimaksud bukan hanya aspek fisik, tetapi juga keberpihakan pemerintah terhadap kelompok ekonomi kecil melalui kebijakan yang terstruktur dan adil.

Menurut (Miftha Thoha, 1989) dalam Prisilia Injilia Dewi Iroth (2021) Pembinaan merupakan tugas yang terus-menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud satu perintah khusus umum dan intruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga atau kelompok. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan yang dilakukan seorang pemimpin. Dimana dalam menjalankan pembinaan diperlukan seorang pemimpin untuk melakukan pembinaan. Berdasarkan penelitian PKL di kawasan Kanrerong Karebosi, Makassar, terdiri dari penjual makanan khas Makassar serta barang-barang kelontong.

Sebagian besar dari mereka belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan usaha. Untuk itu, mereka menerima pendampingan dalam berbagai aspek seperti teknik penjualan, pengelolaan keuangan, cara memasak, dan aspek usaha lainnya. Namun, para PKL ini menghadapi sejumlah kendala, termasuk rasa takut untuk mengembangkan usaha mereka di lokasi baru, yaitu Kanrerong Karebosi. Ketakutan ini muncul karena kekhawatiran akan kerugian, mengingat banyak dari mereka merupakan hasil relokasi dari tempat lain seperti Jl. Sunu, Jl. A.P. Pettarani, dan Jl. Slamet Riyadi.

Model ini memberikan alat analisis yang kuat dan holistik untuk mengkaji implementasi kebijakan publik dalam konteks nyata di lapangan. Ia mampu menjelaskan ketidakefisienan implementasi kebijakan secara menyeluruh, dari desain kebijakan, proses pelaksanaan, hingga faktor- faktor eksternal yang memengaruhinya.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi dan Karakteristik *Policy Brief*

Policy brief merupakan dokumen ringkas hasil analisis kebijakan yang disusun untuk disampaikan kepada pengambil keputusan tingkat atas. Tujuannya adalah untuk mengangkat isu-isu strategis, menyajikan berbagai alternatif kebijakan, serta memberikan bukti-bukti dan rekomendasi baru yang relevan guna mendukung perumusan kebijakan selanjutnya. (Heryana dkk 2020).

Definisi policy brief di Indonesia sebagai dokumen ringkas yang menyajikan analisis dan rekomendasi terkait isu kebijakan tertentu sering kali dikutip oleh berbagai lembaga, termasuk Lembaga Administrasi Negara (Irawati dkk, 2017). Berdasarkan peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat

sebuah *policy brief*, diantaranya:

a. Tentukan isu kebijakan yang menjadi sorotan utama.
b. Jelaskan maksud dan sasaran penulisan.
c. Sajikan data atau informasi yang relevan sebagai dasar pendukung.
d. Bangun argumen dengan bahasa yang mudah dicerna.
e. Rumuskan rekomendasi yang aplikatif bagi pembaca sasaran.
f. Perhatikan batasan panjang tulisan.

Dapat disimpulkan bahwa *policy brief* merupakan dokumen ringkas yang bertujuan menjelaskan alasan mengapa sebuah alternatif kebijakan dipandang paling efektif dalam menangani permasalahan tertentu dalam ranah kebijakan. *Policy brief* biasanya terfokus pada satu opsi kebijakan utama dengan tujuan untuk meyakinkan para pengambil keputusan bahwa isu yang dibahas bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera.

2. Tujuan dan Fungsi Penelitian

Policy brief merupakan media yang menyajikan rekomendasi kebijakan secara singkat namun tetap kaya informasi guna membantu pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, *policy brief* berperan dalam memberikan kontribusi positif melalui penyampaian data dan fakta empiris dari lapangan, sehingga risiko kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan dapat ditekan. Dengan adanya *policy brief*, kualitas kebijakan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan pun dapat ditingkatkan.

3. Sistematika Penulisan Judul *Policy Brief*

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 28 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, penyusunan *policy brief* mencakup sejumlah elemen penting yang harus dipenuhi yaitu:

a. Judul

Diharapkan dibuat dengan semenarik mungkin sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanut serta dibuat secara singkat dan jelas untuk mewakili substansi isi tulisan.

b. Ringkasan eksekutif

Diawali dengan pernyataan singkat yang diharapkan dapat menarik minat pembaca serta terdiri dari kurang lebih 150 kata yang berisikan tujuan dan rekomendasi singkat.

c. Pendahuluan

Diharapkan dapat menjelaskan arti dan urgensi masalah yang berisikan tujuan penelitian serta dapat memberi gambaran terkait temuan dan Kesimpulan.

d. Metodologi

Dalam penulisan diharapkan untuk tidak membahas terlalu teknis dan fokus pada manfaat dan juga peluang yang tersedia, serta berisikan ringkasan fakta-fakta, penjelasan masalah dan konteks, dan berisikan penjelasan metode penelitian dan analisis.

e. Hasil dan Temuan

Berisikan terkait bukti-bukti yang nyata beserta analisis termasuk dampaknya berdasarkan inti permasalahannya.

f. Rekomendasi

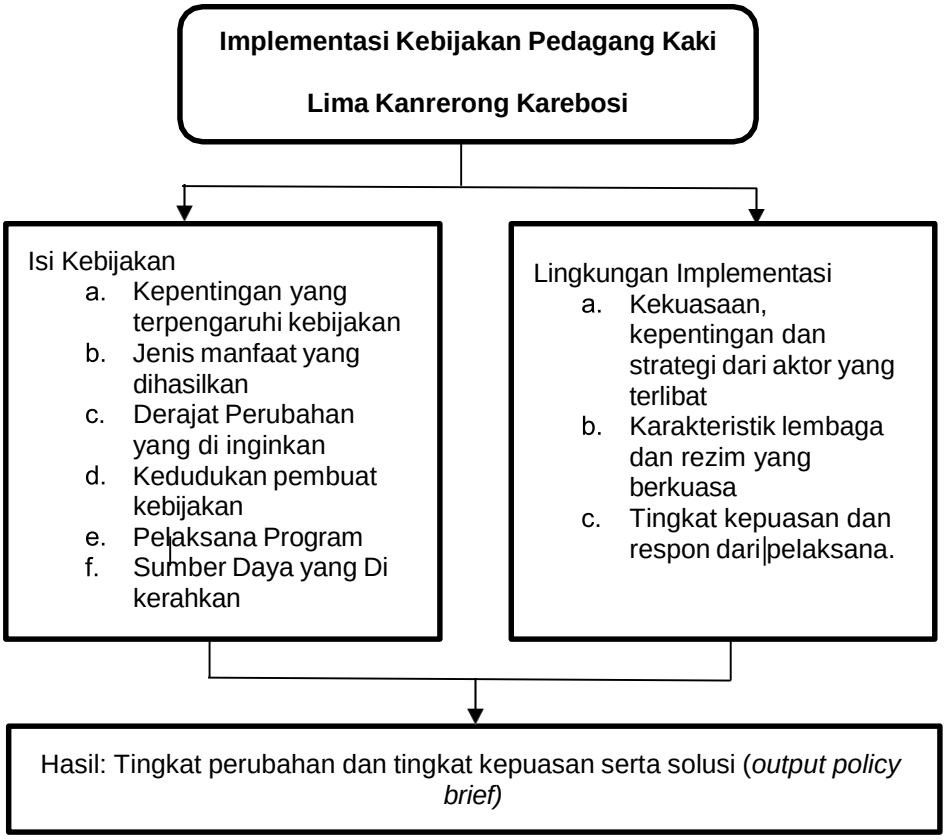
Berisikan apa yang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi.

g. Daftar Pustaka/referensi

Berdasarkan sumber informasi yang jelas dan diperoleh dari media massa cetak maupun elektronik, jurnal ilmiah, buku, prosiding, penelitian, laporan, atau narasumber yang terpercaya, dan lain-lain (Widyaningsih, 2019).

C. Kerangka Pikir

Gambar 3
Model Kerangka Pikir Menurut Marilee S. Grindle



Sumber: Buku Dr. Riant Nugroho, 2008.

Peneliti akan melakukan pengukuran implementasi kebijakan terkait PKL kanrerong karebosi menggunakan indikator yang telah ditetapkan kemudian melakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan *output* skripsi karya berupa *policy brief* yang baik.

Adapun definisi oprasional dari poin pertama isi kebijakan dalam kerangka pikir di atas yaitu:

1. Isi kebijakan

   a) Kepentingan yang terpengaruhi kebijakan

      Kelompok atau individu yang memperoleh atau kehilangan manfaat dari implementasi kebijakan PKL Kanrerong Karebosi.

b) Jenis manfaat yang dihasilkan

Manfaat yang dihasilkan dari implementasi kebijakan PKL, baik bagi PKL maupun masyarakat umum.

c) Derajat perubahan yang di inginkan

Sejauh mana kebijakan ini mengubah kondisi sebelumnya, baik secara struktural (penataan tempat) maupun perilaku (pembinaan).

d) Kedudukan pembuat kebijakan

Otoritas, kewenangan, dan legitimasi instansi atau pihak yang merancang kebijakan ini.

e) Pelaksanaan program

Aktor atau institusi yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, baik di tingkat pusat, daerah, atau komunitas.

f) Sumber daya yang di kerahkan

Segala bentuk dukungan (anggaran, personel, sarana, informasi) yang digunakan untuk mendukung program PKL Kanrerong Karebosi.

Definisi oprasional untuk poin kedua lingkungan implementasi dalam kerangka fikir di atas yaitu:

a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat, Sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan PKL Kanrerong Karebosi (seperti Dinas Perdagang, Satpol PP, PKL itu sendiri, masyarakat, dan instansi lain) memiliki pengaruh (kekuasaan), tujuan tertentu (kepentingan), serta pendekatan atau cara (strategi) dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut.

b) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa, Ciri-ciri atau kondisi dari lembaga pelaksana seperti Dinas Perdagangan Kota

Makassar dan dukungan politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan PKL Kanrerong Karebosi.

c) Tingkat Kepuasan dan Respon dari Pelaksana, Tingkat penerimaan, pemahaman, dan sikap dari para pelaksana kebijakan (termasuk aparat lapangan, petugas teknis, dan pengelola lokasi Kanrerong Karebosi) terhadap kebijakan PKL Kanrerong Karebosi.